



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5797-5809

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akses Setara Bagi Penyandang Disabilitas: Analisis Aksesibilitas Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bandung

Audie Aqmarina^{1✉}, Dian Sinaga², Rully Khairul Anwar³

Universitas Padjadjaran

Email: audie20001@mail.unpad.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tingkat aksesibilitas perpustakaan difabel di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung yang berpedoman pada standar IFLA sebagai acuan indikator ketersediaan serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak perpustakaan dalam menyediakan layanan tersebut. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Temuan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu Pertama, aksesibilitas di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh IFLA, meskipun perpustakaan sudah berupaya untuk memenuhi standar tersebut namun masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam menyediakan layanan yang dikhususkan bagi pemustaka dengan disabilitas. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan tingkat aksesibilitas di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung baru mencapai 44.14%, dengan rincian dari 111 butir instrument yang terdapat dalam standar IFLA Checklist, 49 butir dinyatakan tersedia dan sesuai dengan standar, sementara 62 butir lainnya masih belum tersedia. Ketiga, pihak perpustakaan memiliki kendala dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas, kendala-kendala tersebut hadir dari berbagai faktor, mulai dari faktor eksternal hingga faktor internal.

Kata Kunci: *Aksesibilitas, Disabilitas, IFLA Checklist, Perpustakaan*

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of accessibility of the library for the disabled at the Bandung City Archives and Library Service which is guided by the IFLA standard as a reference for availability indicators and to determine what obstacles are faced by the library in providing these services. The data collection techniques for this study are observation, documentation, and interviews with descriptive qualitative research types. The findings obtained in this study are First, accessibility at the Bandung City Archives and Library Service is not fully in accordance with the standards issued by IFLA, although the library has made efforts to meet these standards, there are still many shortcomings found in providing services specifically for users with disabilities. Second, based on the results of calculations that have been carried out, the level of accessibility at the Bandung City Archives and Library Service has only reached 44.14%, with details of the 111 instrument items contained in the IFLA Checklist standard, 49 items are declared available and in accordance with the standards, while the other 62 items are still not available. available. Third, the library has obstacles in providing services for people with disabilities. These obstacles arise from various factors, ranging from external factors to internal factors.

Keyword: *Accessibility, Disability, IFLA Checklist, Library*

PENDAHULUAN

Perpustakaan sebagai salah satu lembaga publik penyedia informasi tentunya memiliki peranan penting dalam menawarkan layanan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua konsumen, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Seperti yang tertera pada UUD RI No 8 Tahun 2016 bahwasannya negara menjamin keberlangsungan hidup setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Beberapa hak yang dilindungi, diantaranya memiliki status yang sama dalam sistem hukum, mampu terlibat dalam berbagai kegiatan dengan mudah, aman, dan nyaman, serta memperoleh layanan dari berbagai sektor publik seperti perpustakaan. Pengunjung perpustakaan tidak hanya membaca, belajar, dan melakukan penelitian, tetapi mereka juga berharap untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun koneksi, yang merupakan tujuan lain dari kunjungan mereka. Pambudi & Nurizzati (2024) memaparkan bahwasannya secara umum, setiap manusia memiliki kebutuhan yang serupa, namun cara untuk memenuhinya bisa berbeda-beda. Selain itu, fasilitas yang diperlukan oleh masing-masing individu juga dapat bervariasi, begitu pula dengan layanan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perpustakaan sudah seharusnya memiliki kesiapan guna memenuhi semua tuntutan penggunaannya sehingga dapat memanfaatkannya sesuai tujuannya.

Penyandang disabilitas yaitu kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu yang lama. Menurut (Nurfadilawati et al, 2020), keterbatasan tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat berperan secara utuh dan efektif berdasarkan hak yang sama dan menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sesuai UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM, penyandang

disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak berhak memperoleh fasilitas dan perawatan tertentu (UU Republik Indonesia, 1999). Berpedoman dari ini, penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial, fasilitas yang mudah diakses yang meningkatkan kemandirian mereka, serta banyak lagi.

Selanjutnya pengertian dan kategori penyandang disabilitas dijelaskan lebih lanjut pada bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU No 8 Tahun 2016 yang secara spesifik mendefinisikan apa itu (UU Republik Indonesia, 2016) ; (1) Penyandang Disabilitas fisik meliputi gangguan fungsi motorik, seperti amputasi, lumpuh kaku atau pincang, paraplegia, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, dan perawakan kecil; (2) Penyandang Disabilitas intelektual meliputi lambat belajar, disabilitas intelektual, dan sindrom Down; (3) Penyandang Disabilitas mental meliputi gangguan pada ranah berpikir, emosi, dan perilaku; dan (4) Penyandang Disabilitas sensorik meliputi gangguan pada satu atau lebih dari kelima indera.

Kewajiban perpustakaan untuk memiliki kesiapan dalam melayani penggunaannya termasuk mereka dengan disabilitas, tercantum dalam UUD No 43 Tahun 2007 mengenai Perpustakaan dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwasannya akses dan penggunaan sumber daya perpustakaan merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang (UU Republik Indonesia, 2007). Selain itu, dalam pasal tersebut ditegaskan pula bahwasannya penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan spesifik mereka. (Diana & Dewiki, 2020) mengatakan bahwa jika administrator perpustakaan di Indonesia ingin menciptakan dan menawarkan layanan dan fasilitas yang dapat diakses, mereka harus mulai dengan memasukkan hak-hak disabilitas ke dalam semua peraturan negara. Dalam konteks ini, perpustakaan sudah seharusnya berpihak kepada seluruh penggunaannya tanpa terkecuali pengguna penyandang disabilitas. Dengan kata lain, perpustakaan inklusif adalah perpustakaan yang menyediakan layanan informasi bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, keterampilan, jabatan, keadaan, atau budaya.

Meskipun regulasi mengenai penyandang disabilitas telah diresmikan oleh pemerintah, kenyataan yang terdapat di lapangan menunjukkan masih sering kali ditemukan penyandang disabilitas yang menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan perpustakaan, mulai dari aksesibilitas perpustakaan dalam bentuk fisik seperti tangga tanpa ramp atau lift, toilet yang tidak memadai hingga kurangnya materi bacaan dalam format Braille, audio maupun teks. Kondisi inilah yang menjadi penyebab penggunaan perpustakaan dengan disabilitas tidak dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Hal tersebut berdampak pada hak mereka yang tidak terpenuhi secara baik untuk memperoleh informasi dan pendidikan yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi masalah aksesibilitas yang dialami penyandang disabilitas saat menggunakan perpustakaan,

perpustakaan harus mengambil tindakan yang tepat (Handari, 2019).

Aksesibilitas merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses dan memanfaatkan lingkungan, produk, layanan, atau informasi tanpa hambatan atau diskriminasi, termasuk di perpustakaan fisik dan virtual. Hal ini mencakup kemudahan mengakses sumber daya online seperti database dan situs web, yang penting bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan (Poerwanti & Utama, 2021). Selain itu, Indrayani et al, (2024) memaparkan bahwasannya aksesibilitas dibagi menjadi dua kategori: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas nonfisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan infrastruktur, sementara aksesibilitas nonfisik berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang disediakan perpustakaan untuk membantu penyandang disabilitas menggunakan sumber daya mereka. Dalam disabilitas, aksesibilitas berarti bahwa lingkungan, produk, layanan, informasi, dan teknologi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh individu dengan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau kognitif. Aksesibilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama tersedia bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, serta masyarakat secara penuh, serta untuk memastikan inklusi mereka dalam masyarakat dan memenuhi HAM mereka.

Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana publik, serta pengaturan tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi dan pendidikan yang sama (PERDA Jawa Barat, 2013). Kota Bandung yang merupakan sebuah kota besar di provinsi Jawa Barat dengan berbagai institusi pendidikan dan budaya tentunya perlu untuk mengoptimalkan peran perpustakaan umum Kota Bandung dalam melayani seluruh warganya secara inklusif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampai tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandung mencapai 4.444 jiwa dengan 696 jiwa diantaranya menyandang disabilitas fisik, 909 jiwa lainnya menyandang disabilitas sensorik, dan 2.819 jiwa menyandang disabilitas lainnya seperti disabilitas mental atau jiwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya dan terkait dengan permasalahan minimnya fasilitas lembaga informasi seperti perpustakaan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka peneliti tertarik meneliti kesiapan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dalam menyediakan fasilitas dan layanan bagi pengguna dengan disabilitas yang berpedoman pada standar IFLA *Checklist*. Karena standar IFLA *Checklist* merupakan pedoman yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh otoritas internasional yang berkaitan dengan perpustakaan dan informasi, maka standar ini dipilih untuk berfungsi sebagai indikasi referensi dan pedoman dalam penelitian ini. Dalam (Arumsari & Krismayani, 2018) mengatakan bahwa standar perpustakaan yang tercantum dalam IFLA *Checklist* terdiri atas tiga kategori, yakni standar akses fisik, format media dan

layanan serta komunikasi antara staf perpustakaan dengan penyandang disabilitas. Sesuai latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tingkat aksesibilitas perpustakaan difabel di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung yang berpedoman pada standar IFLA sebagai acuan indikator ketersediaan serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak perpustakaan dalam menyediakan fasilitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data secara objektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif untuk memastikan atau mengkarakterisasikan aktualitas kejadian yang diteliti. Menurut Sidiq dalam karya Choiri dan Mujahidin (2019), penelitian kualitatif yaitu pendekatan penyelidikan yang menyoroti pencarian konsep, makna, pemahaman, gejala, simbol, atau deskripsi suatu fenomena. Penelitian ini juga berfokus pada multimetode, alami, holistik, berfokus pada kualitas, menggunakan berbagai metode, dan disajikan secara naratif (Sidiq et al., 2019). Dengan kata lain, tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk membahas suatu fenomena atau topik dengan menerapkan metode ilmiah yang sistematis dengan pendekatan kualitatif.

Metode untuk memperoleh data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 2 orang, dimana 1 orang petugas perpustakaan yang bertugas di bidang pengelolaan dan 1 orang pustakawan. Instrumen dari penelitian ini yaitu indikator yang mengacu kepada butir-butir elemen yang terdapat di dalam IFLA *Checklist for Access to Libraries for Persons with Disabilities*. Data temuan observasi dan wawancara nantinya akan dianalisis secara sistematis dengan hasil berupa persentase kesesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses Fisik

Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bandung memiliki halaman yang cukup luas. Area luar perpustakaan dilengkapi dengan beberapa wahana permainan bagi anak-anak yang datang berkunjung, sedangkan untuk area parkirnya terbagi menjadi dua lokasi. Lokasi pertama berada di halaman depan perpustakaan dan jaraknya dekat dengan pintu masuk, selain itu lokasi pertama ini dilengkapi dengan piktogram besar berwarna biru yang menandakan arah jalan masuk untuk penyandang disabilitas. Namun, lokasi pertama ini berukuran kecil, area parkir hanya mampu menampung beberapa mobil saja dengan jarak antar mobil yang cukup sempit, hal ini dapat menyulitkan pemustaka yang membawa kursi roda mengingat mereka membutuhkan ruang gerak yang luas untuk menurunkan dan juga menggunakan kursi roda tersebut. Lokasi parkir kedua berada di basement perpustakaan dengan ukuran yang lebih besar dari lokasi pertama. Area ini dapat digunakan untuk pemustaka yang membawa mobil maupun motor dan difasilitasi tangga hingga lift untuk

menuju area lobi atau pintu masuk perpustakaan. Dari kedua area parkir tersebut belum disediakan parkir khusus untuk penyandang disabilitas, semua parkir berukuran sama tanpa tanda khusus untuk penyandang disabilitas.

Jalan yang dilalui pemustaka menuju pintu masuk dari area luar perpustakaan berupa tangga dan juga tanjakan atau ramp yang dilengkapi dengan railing di kedua sisinya untuk memastikan keselamatan pemustaka. Selain itu, ramp yang disediakan perpustakaan memiliki permukaan yang bertekstur kasar dengan kemiringan yang tidak terlalu curam sehingga memudahkan pemustaka dengan kursi roda untuk melalui jalan tersebut menuju pintu masuk. Jarak antara tangga dan anak tangga pun tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan pemustaka untuk menggunakannya. Kemudian permukaan pintu masuk memiliki tekstur halus dan tidak licin untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, telepon khusus yang dapat digunakan oleh pelanggan tuna rungu saat ini tidak dipasang di area luar perpustakaan.

Area masuk Disarpus Kota Bandung memiliki ruang yang luas dan tidak terhalang apapun memungkinkan pengguna kursi roda untuk memutar atau berbalik di area itu. Ukuran pintu masuk perpustakaan yang lebar dengan ambang pintu yang tidak menghalangi akses masuk juga memberikan kemudahan bagi pengguna kursi roda untuk melaluinya. Pintu masuk perpustakaan ini belum dilengkapi dengan pembuka pintu otomatis, namun untuk mensiasati hal tersebut pintu masuk selalu dibiarkan terbuka sehingga memudahkan pemustaka masuk ke dalam perpustakaan. Di dekat pintu masuk pun terdapat pos keamanan dengan satpam yang selalu siap siaga untuk membantu pemustaka.

Perpustakaan juga menyediakan lift yang dapat digunakan pemustaka untuk mencapai lokasi ruangan yang mereka inginkan. Lift ini dilengkapi dengan penerangan yang baik, railing di dalam lift sebagai tumpuan untuk berpegangan bagi pemustaka dan juga tombol dalam huruf braille yang letaknya mudah dijangkau untuk pemustaka dengan kursi roda, ukuran pintu lift pun cukup lebar sehingga memudahkan kursi roda untuk masuk ke dalam lift. Namun lift yang disediakan ini belum dilengkapi audio sintetis untuk memberikan informasi keterangan lantai, selain itu tidak terdapat tanda berupa pictogram yang menunjukkan arah menuju lift.

Pengguna perpustakaan dapat menggunakan tiga area: ruang baca anak-anak, ruang baca dan komputer, serta ruang baca remaja dan dewasa. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tidak disediakan tanda khusus dalam bentuk pictogram untuk mengarahkan pemustaka ke tiga area tersebut, melainkan perpustakaan memberikan keterangan berupa tulisan di atas tiap area, seperti tulisan "Ruang Baca Anak" untuk area baca yang dikhususkan bagi pemustaka anak-anak.

Ketika memasuki ruang baca tersebut, jarak antar rak buku dapat dikatakan cukup luas, setidaknya dapat dilewati oleh kursi roda tanpa kesulitan, lorong diantara rak buku pun tidak terhalang oleh benda apapun sehingga memudahkan kursi roda untuk bergerak. Namun untuk mengakses koleksi yang berada di rak, mungkin beberapa pemustaka terutama yang

menggunakan kursi roda memerlukan bantuan orang lain karena ukuran rak yang cukup tinggi.

Bagi sebagian pengunjung perpustakaan yang kesulitan mengakses koleksi-koleksi ini, kehadiran petugas perpustakaan mampu memberikan solusi. Kemudian, tiap ruang baca di perpustakaan belum dilengkapi dengan meja baca dan komputer yang ketinggiannya dapat disesuaikan, semua meja berukuran sama. Kursi yang berada di ruang baca tidak memiliki sandaran tangan, kursi yang disediakan hanya dilengkapi sandaran di bagian belakang kursi saja.

Salah satu hal yang seharusnya disediakan perpustakaan adalah toilet yang tentunya dapat digunakan baik orang tua, anak-anak, ataupun penyandang disabilitas (Rahmayani, 2020). Disarpus Kota Bandung menyediakan toilet yang dapat digunakan oleh pemustakanya, jumlah toilet yang disediakan cukup banyak dan terletak di beberapa sudut perpustakaan. Toilet terdiri atas dua macam yakni toilet duduk dan toilet jongkok. Namun belum tersedia toilet yang dikhususkan untk penyandang disabilitas, ukuran ruang dalam bilik toilet pun cukup sempit sehingga akan cukup sulit bagi pemustaka dengan kursi roda untuk menggunakan toilet tersebut. Tidak ditemukan juga alarm di dalam toilet yang dapat digunakan pemustaka apabila mengalami kesulitan maupun terjadi situasi darurat. Wastafel dan cermin yang berada di dalam toilet memiliki tinggi yang cukup dan memiliki ruang yang cukup luas di bawah wastafel sehingga memungkinkan pemustaka dengan kursi roda untuk dengan mudah menggunakannya.

Meja sirkulasi di Disarpus Kota Bandung menyatu dengan meja referensi atau informasi dan berada dekat pintu masuk perpustakaan. Pengguna kursi roda dapat menjangkau meja tersebut meskipun tingginya tetap, yang merupakan meja standar. Sistem sirkulasi yang digunakan masih menggunakan cara konvensional yakni dilayani oleh pemustaka, belum tersedia layanan sistem sirkulasi mandiri (*self service*). Di depan meja sirkulasi dan meja referensi, perpustakaan menyediakan kursi yang dapat digunakan sebagai kursi tunggu, sehingga pemustaka tidak merasa pegal ketika terdapat antrian. Namun kursi tersebut tidak dilengkapi dengan sandaran punggung maupun sandaran tangan.

sistem loop induksi (*loop induction system*) yang dapat memperkuat suara di sekitar pemasangannya, belum tersedia di meja sirkulasi maupun meja referensi. Sistem ini biasanya dimanfaatkan oleh pemustaka tuna rungu. Pelayanan sirkulasi dan referensi yang disediakan oleh perpustakaan dimaksimalkan oleh petugas perpustakaan khusus yang memiliki latar belakang perpustakaan (*pustakawan*). Petugas perpustakaan yang bertugas mengawasi area ini memulai komunikasi dan menanggapi pertanyaan dari pengguna pada waktu dan tempat saat itu.

Perpustakaan menyediakan departemen yang khusus digunakan untuk pemustaka anak-anak. Departemen ini ditandai dengan tulisan yang terdapat di atas ruang baca, belum tersedia

pictogram yang mengarahkan pemustaka untuk memasuki departemen ini. Fasilitas yang disediakan di departemen anak cukup beragam mulai dari ruang baca khusus yang terpisah dari ruang koleksi dengan berbagai mainan di dalamnya dan warna ruangan yang menarik. Ukuran kedua ruangan baik ruang baca maupun ruang koleksi cukup luas sehingga memudahkan pemustaka yang menggunakan kursi roda dalam mengakses ruangan-ruangan ini. Selain itu, ukuran rak buku yang rendah memudahkan pemustaka anak-anak untuk menjangkaunya. Fasilitas lainnya adalah komputer edukatif yang dapat digunakan oleh pemustaka, namun beberapa komputer tersebut dalam kondisi rusak dan sudah lama belum diperbaiki. Perpustakaan pun menyediakan media berupa koleksi audio-visual yang berasal dari koleksi buku yang sebelumnya telah di-alih mediakan.

Disarpus Kota Bandung tidak menyediakan departemen yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam hal pelayanan baik dalam segi koleksi, sarana dan prasarana serta layanan dari petugas perpustakaan tentunya tetap mempertimbangkan pada kebutuhan pemustaka dengan disabilitas.

Format Media

Begitu banyak koleksi milik oleh Disarpus Kota Bandung yang dapat dimanfaatkan oleh pemustakanya. Sebagian besar koleksi tersebut dalam bentuk tercetak, dan beberapa lainnya telah dilakukan alih media ke dalam bentuk audio-visual. Perpustakaan pun memiliki beberapa koleksi buku braille dan buku pop-up yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka tuna netra. Buku pop-up yaitu buku tiga dimensi dengan ilustrasi yang bergerak dan tampak jelas. Jenis buku ini termasuk ke dalam jenis buku bergambar taktik (*tactile picture book*). Buku pop-up dapat memudahkan tuna netra dalam memahami ilustrasi bergambar pada sebuah buku.

Perpustakaan juga memungkinkan penggunaanya menggunakan komputer yang merupakan sumber materi lainnya. Terdapat dua komputer yang telah dilengkapi dengan aplikasi braille bagi pemustaka tuna rungu. Untuk mengakses komputer tersebut, petugas perpustakaan akan memberika bantuan jika pemustaka mengalami kesulitan. Meskipun demikian, saat ini tidak satu pun komputer memiliki papan ketik atau layar yang dapat digunakan oleh penyandang tuna netra atau tuna rungu supaya mereka dapat menggunakan komputer secara mandiri. Begitu pula dengan *software* yang terdapat di dalam komputer belum dilengkapi dengan software JAWS. Menurut Supriyatna & Dewi (2019) JAWS merupakan singkatan dari *Job Access With Speech*, yaitu program pembaca layar yang membantu pustakawan dalam penggunaan komputer.

Layanan dan Komunikasi

Disarpus Kota Bandung sempat mengadakan pelatihan kepada pustakawan mengenai pelayanan khusus difabel, seperti pelatihan bahasa isyarat dan pelatihan braille. Namun pelatihan tersebut sudah lama sekali tidak dilakukan kembali, dengan kata lain pelatihan tidak dilakukan secara rutin. Dari hasil wawancara dengan pihak peprustakaan, informasi mengenai

teknologi yang dapat diakses harus dibagikan agar karyawan perpustakaan dapat melayani pengguna dengan disabilitas dengan cara yang tepat. Metode yang ada saat ini untuk menyebarkan informasi ini adalah rapat, absen pagi, dan bentuk komunikasi lainnya. Namun, layanan umum menjadi pokok bahasan informasi yang disebarakan.

Layanan khusus yang diberikan perpustakaan melalui penyediaan koleksi seperti buku Braille, yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Namun diluar itu, perpustakaan belum menyediakan layanan yang secara khusus disediakan bagi pemustaka difabel. Sesuai hasil wawancara dengan petugas perpustakaan, pihak perpustakaan sendiri memang jarang sekali menerima kunjungan dari pemustaka dengan disabilitas, hal tersebut yang menjadi salah satu alasan perpustakaan belum menyediakan layanan khusus bagi pemustaka difabel.

Perpustakaan menyediakan informasi untuk pemustaka disabilitas melalui brosur yang dapat disebarakan kepada pemustaka. Selain itu, perpustakaan juga memiliki situs web yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan pemustaka disabilitas dalam mengakses informasi, seperti mode suara, pengaturan ukuran teks, dan penyesuaian kontras warna. Dengan kombinasi brosur cetak dan situs web yang aksesibel, perpustakaan berupaya memberikan layanan informasi yang inklusif bagi semua pemustaka.

Perpustakaan belum menyediakan informasi yang diciptakan khusus untuk pemustaka tuna rungu, seperti informasi dalam bentuk video bahasa isyarat. Upaya untuk mengembangkan format informasi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas ini masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan.

Listyaningrum (2023) mengatakan bahwa melakukan modifikasi pada bentuk media informasi dapat menciptakan informasi yang lebih aksesibel, dalam hal ini misalnya menggunakan ukuran teks yang besar dan menyediakan layanan "*communication support*". Berdasarkan pengamatan terhadap situs web yang dimiliki oleh Disarpus Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa situs web tersebut mudah untuk diakses oleh pemustaka yang membutuhkan informasi mengenai perpustakaan karena penyajian informasi yang tertera dapat dikatakan cukup lengkap. Selain itu, situs web telah dilengkapi dengan berbagai opsi bagi pemustaka penyandang disabilitas, seperti tersedia fitur mode suara, pengaturan ukuran teks, penyesuaian kontras warna dan banyak fitur lainnya, fitur – fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh pemustaka, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, visual atau kognitif dapat dengan mudah mengakses serta memanfaatkan informasi yang tersedia di situs web tersebut.

Mengenai bentuk kerjasama antara perpustakaan dengan komunitas penyandang disabilitas, perpustakaan telah beberapa kali mengadakan acara yang melibatkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam bentuk lomba yang diselenggarakan oleh pihak perpustakaan. Terdapat departemen khusus dalam struktur perpustakaan yang ditugaskan untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksternal dalam hal ini termasuk

komunitas penyandang disabilitas. Jika ada informasi mengenai acara yang diselenggarakan oleh pihak perpustakaan, departemen tersebut akan menyebarkan informasi baik melalui sosial media yang dimiliki perpustakaan hingga media komunikasi lainnya. Bentuk kerjasama lainnya adalah pengadaan koleksi. Pihak perpustakaan telah melakukan kerjasama dengan salah satu penerbit, beberapa kali penerbit telah menyumbangkan koleksi berupa buku braille dan koleksi audio-visual kepada pihak perpustakaan.

Data dikumpulkan dari semua instrumen yang telah diperiksa sesuai dengan standar IFLA Checklist, berdasarkan temuan penelitian tentang pemeriksaan aksesibilitas perpustakaan bagi difabel di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Tiga area yang menjadi mayoritas standar IFLA yaitu akses fisik, format media serta layanan dan komunikasi. Mengenai kategori pertama yakni akses fisik, terdapat 52 butir indikator kesesuaian. Dari 52 indikator tersebut, sebanyak 27 butir dinyatakan tersedia dan telah sesuai dengan standar dan 25 butir lainnya dinyatakan belum tersedia. Selanjutnya, kategori kedua yakni format media, terdapat 13 indikator kesesuaian. Dari 13 indikator tersebut, sebanyak 6 butir dinyatakan tersedia dan sesuai dengan standar, sementara 7 butir lainnya dinyatakan belum tersedia. Kategori terakhir dari standar IFLA Checklist adalah layanan dan komunikasi, secara keseluruhan kategori ini memiliki 46 indikator kesesuaian. Dari 46 indikator tersebut, sebanyak 16 butir dinyatakan tersedia dan telah sesuai dengan standar, kemudian sebanyak 30 butir dinyatakan belum tersedia.

Mengenai tingkat aksesibilitas perpustakaan berdasarkan data yang sebelumnya telah dijabarkan, diperoleh hasil bahwa pada kategori akses fisik sebesar 51,9% telah memenuhi standar, pada kategori format media sebesar 46,1% telah memenuhi standar dan yang terakhir pada kategori layanan dan komunikasi sebesar 34,7% telah memenuhi standar. Sementara secara keseluruhan ketiga kategori tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data kesesuaian standar IFLA Checklist

No.	Standar IFLA	Tersedia	Belum Tersedia
1	Akses fisik	27	25
2	Format media	6	7
3	Layanan dan Komunikasi	16	30
Jumlah indikator: 111		Tingkat kesesuaian: $\frac{49 \times 100\%}{111} = 44,14\%$	
Tersedia : 49			
Belum tersedia : 62			

Sumber: hasil penelitian, 2024

Maka dari itu, dengan menggunakan data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat hasil perhitungan yang tertera dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian layanan perpustakaan dalam pemenuhan aksesibilitas baru mencapai 44,14%, sementara layanan yang belum sesuai dengan standar mencapai 55,85%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas perpustakaan difabel di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung belum sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh IFLA.

Kendala yang Dimiliki Perpustakaan Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Difabel

Kendala yang seringkali dimiliki oleh perpustakaan adalah sulitnya pengajuan peralatan atau fasilitas untuk menunjang kebutuhan pemustaka difabel seperti kursi roda dan tongkat untuk disabilitas fisik. Pihak perpustakaan sudah beberapa kali melakukan pengajuan untuk peralatan tersebut namun hingga saat ini belum ada persetujuan dari pihak berwenang. Kendala eksternal lainnya adalah jarang nya pemustaka difabel yang mengunjungi perpustakaan, hal ini menyebabkan perpustakaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus apa saja yang dibutuhkan oleh pemustaka difabel ketika mengunjungi perpustakaan.

Kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh perpustakaan memberikan kesulitan bagi petugas perpustakaan ketika memberikan pelayanan untuk pemustaka difabel. Mereka tidak dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan khusus dalam melayani pemustaka difabel, misalnya cara untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, kemampuan membaca huruf braille dan lainnya. Sejauh ini hanya beberapa petugas perpustakaan saja yang memiliki keterampilan khusus tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis aksesibilitas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat aksesibilitas perpustakaan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar IFLA. Meskipun beberapa fasilitas telah tersedia, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan pemustaka disabilitas secara optimal. Diperoleh hasil perhitungan mengenai tingkat aksesibilitas yang sesuai dengan standar baru mencapai angka 44,14%, sementara yang belum sesuai mencapai angka 55,85%. Selain itu, berdasarkan kendala yang dialami oleh pihak perpustakaan maka terdapat sejumlah tantangan yang perlu untuk diatasi. Tantangan ini meliputi pengadaan peralatan yang lebih lengkap, peningkatan pelatihan bagi staf, serta strategi untuk menarik lebih banyak pemustaka disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, D., & Krismayani, I. (2018). Analisis aksesibilitas gedung Perpustakaan Universitas Brawijaya oleh mahasiswa difabel. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(3), 201–210.
- Diana, M., & Dewiki, S. (2020). Analisis aksesibilitas perpustakaan bagi difabel berdasarkan pada standar IFLA di dinas perpustakaan propinsi Sumatera Selatan. *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, 4(1), 1–18.
- Handari, B. (2019). Aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara: studi evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. *Media Pustakawan*, 26(2), 91–97.
- Indriyani, M., Safri, T. M., & Fajarni, S. (2024). Kajian Kompetensi Pustakawan terhadap Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- Listyaningrum, I. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5757–5762.
- Nurfadlilawati, I., Fauzan, M. R., Azizah, A. N., & Fatimah, T. (2020). Fasilitas Bagi Pemustaka Disabilitas Di Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. *Researchgate. Net*, no. May.
- Pambudi, D. M., & Nurizzati, N. (2024). Aksesibilitas Pemustaka Penyandang Disabilitas Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Standar IFLA Checklist. *Journal of Creative Student Research*, 2(1), 171–182.
- PERDA Jawa Barat. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas*.
- Poerwanti, S. D., & Utama, Y. H. C. (2021). Aksesibilitas Layanan Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Jember. *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(2).
- Rahmayani, A. A. (2020). Kajian literatur desain perpustakaan ramah disabilitas. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(1), 75–96.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.
- Supriyatna, S., & Dewi, A. O. (2019). Analisis aksesibilitas layanan perpustakaan sekolah luar biasa negeri pembina yogyakarta bagi siswa disabilitas. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(1), 191–200.
- UU Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- UU Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.
- UU Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*